



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870**

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@minerba.esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

**BERITA ACARA HASIL *ONE ON ONE MEETING*
MONEV CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I & TRIWULAN II TAHUN 2018
UNIT ESELON II LINGKUP DITJEN MINERBA**

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018
Unit : Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Telah dilaksanakan *One-on-One Meeting* tentang Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2018 Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan atas Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 567.Und/07/SDB/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal undangan.

Dengan catatan hasil pembahasan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Paraf
1	<p>Realisasi indikator kinerja “jumlah rancangan peraturan perundang-undangan”</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018: Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan telah terealisasi sebanyak 2 (dua) rancangan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. <p>b) Pada triwulan II tahun 2018: Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan telah terealisasi sebanyak 3 (tiga) rancangan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;2. Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;3. Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.	

No.	Keterangan	Paraf
2	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah penelaahan dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang mineral dan batubara dan peraturan terkait”</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018 belum dilakukan penelaahan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dikarenakan belum adanya permohonan masukan atas Rancangan Peraturan Perundang-undangan dari Kementerian/Lembaga terkait.</p> <p>b) Pada triwulan II tahun 2018 belum dilakukan penelaahan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dikarenakan belum adanya permohonan masukan atas Rancangan Peraturan Perundang-undangan dari Kementerian/Lembaga terkait.</p>	
3	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah pertimbangan hukum bidang minerba”</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018: Jumlah pertimbangan hukum bidang Minerba pada triwulan I TA 2018 telah terealisasi sebanyak 29 dokumen, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat kepada Direktur PT Berkah Sukses; 2. Surat kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Utara; 3. Nodin perihal IUP OP PT Sriwijaya Bintang Energi dan IUP OP PT Brayon Bintang Energi; 4. Nodin kepada Kasubdit Pelayanan Usaha Batubara perihal IUP OP PT Sarolangun Karang Mendapo; 5. Pertimbangan Hukum Net/Konsep Surat Tagihan Royalti Tahun 2012-2013 atas nama PT Gandasari Resources; 6. Hasil pertemuan Tindak Lanjut Laporan PT Mustika Indah Abadi Coal Mining kepada Ombudsman; 7. Nodin kepada Dirjen perihal Jaminan Kesungguhan atas nama PT Barelang Internasional Ekspansindo (PT BIE); 8. Draft Surat Pengakhiran IUP PT Bunga Masamba; 9. Nodin perihal Kronologis Perkara dan Net/Konsep Surat PT Mikgro Metal Perdana (PT MMP); 10. Nodin kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba perihal permohonan untuk dilakukan pengawasan serta penelitian dan pemeriksaan PETI; 11. Nodin kepada kepala PPNS Minerba perihal tindak lanjut inventarisasi dan analisis potensi kerugian Negara akibat PETI; 12. Nodin kepada Dirjen perihal Draft Tanggapan atas Petisi Terkait Surat Keputusan No. 441.K/30/DJB/2017; 13. Nodin kepada Dir. Pembinaan Pengusahaan Batubara perihal Pendapat Hukum Permohonan Penyesuaian IUP PMA tanggal 6 Februari 2018; 14. Nodin kepada Kasubdit Pelayanan Usaha Mineral perihal Pertimbangan Hukum IUP PT Wanagon Anoa Indonesia dan IUP PT James and Armando Pundimas; 15. Nodin kepada Dirjen perihal Penjelasan Pengalihan IUP PT Sultra Jembatan Mas; 16. Nodin kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara perihal 	

No.	Keterangan	Paraf
	<p>Pendapat Hukum Permohonan Penyesuaian IUP PMA tanggal 26 Februari 2018;</p> <ol style="list-style-type: none"> 17. Surat mengenai Status PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT); 18. Nodin kepada Sesditjen perihal notulensi rapat rancangan surat edaran; 19. Nodin kepada Dirjen Minerba mengenai draft surat balasan untuk kedutaan India; 20. Surat kepada Dutabesar India; 21. Nodin kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral perihal penyampaian surat permohonan konfirmasi IUP; 22. Nodin kepada Kasubdit Pengelolaan Wilayah Mineral dan Batubara perihal Permintaan keterangan dari kepolisian resor Kutai Kartanegara; 23. Nodin kepada Kasubdit Pelayanan Usaha Mineral dan Kasubdit Pengelolaan Wilayah Minerba perihal Permohonan Data Legalitas Pertambangan; 24. Surat kepada PT Mushar Utama Sultra; 25. Nodin kepada Dir. Pembinaan Pengusahaan Batubara perihal permohonan keterangan; 26. Nodin kepada Kasubdit Bimbingan Usaha Batubara dan Kasubdit Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara perihal permintaan kehadiran sebagai saksi di persidangan (PT AKT); 27. Nodin kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan batubara perihal permohonan saksi ahli oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda untuk menjelaskan harga NEWC batubara periode tahun 2014-2015 dan teknis jual beli batubara 28. Nodin kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara perihal permohonan saksi ahli oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda untuk menjelaskan prosedur operasi standar pengiriman batubara; 29. Surat kepada Deputi Bidang Pencegahan Korupsi Pemberantasan Korupsi, Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Dirjen Perhubungan laut Kemenhub. <p>b) Pada triwulan II tahun 2018: Jumlah pertimbangan hukum bidang Minerba pada triwulan II TA 2018 telah terealisasi sebanyak 20 dokumen, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat kepada Kepala Dinas ESDM perihal Penjelasan Pengalihan IUP PT Sultra Jembatan Mas; 2. Pertimbangan Hukum Pemberitahuan Berakhirnya IUP Eksplorasi PT Wanyang Mining Gayoindo; 3. Surat kepada Direktur PT Ganda Alam Makmur perihal permohonan arahan ganti rugi atas penyewaan lahan; 4. Surat kepada Direktur Utama PT Seputih Makmur Bersama dan Direktur Utama PT Usaha Gemilang; 	

No.	Keterangan	Paraf
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Surat kepada PT Bank Mandiri perihal permohonan pencairan jaminan kesungguhan atas nama Barelang Internasional Ekspansindo; 6. Nodin kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara perihal Tanggapan Perubahan Kepemilikan Saham dan Perubahan Direksi-Komisaris dan Tempat Kedudukan Persero PKP2B PT Pesona Khatulistiwa Nusantara; 7. Nodin kepada Dir. Pembinaan Pengusahaan Batubara perihal Pengantar Pelimpahan Batubara Temuan; 8. Surat kepada Badan Reserse Kriminal Polri perihal permintaan data PT Inexco Jaya Makmur; 9. Surat kepada Kepolisian Negara RI perihal permintaan data PT Muara Alam Sejahtera; 10. Surat untuk Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Lampung; 11. Surat untuk Paguyuban Purnawirawan TNI; 12. Surat kepada Direktur PT Holcim Indonesia; 13. Nodin kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba perihal Pengantar konsep tanggapan surat terhadap PT Holcim Indonesia, Tbk; 14. Nota Dinas perihal Pertimbangan Hukum Pembatalan Pencabutan IUP PT Bengkayang Bumi Mineral untuk Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara; 15. Surat kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Jawa Timur; 16. Nodin kepada Dir. Pembinaan Program Minerba dan Dir. Pembinaan Pengusahaan Mineral tentang Pengantar Permohonan Data dan Pera terkait perizinan pertambangan; 17. Nodin kepada Dir. Pembinaan Pengusahaan batubara perihal Pelaporan Masy. Petani tentang Penyerobotan Lahan Perkebunan/Pertanian oleh PT KPC; 18. Surat kepada Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri perihal Data dan Peta IUP di Kab. Konawe Utara; 19. Surat kepada Dir. Pembinaan Pengusahaan Mineral mengenai Permohonan penjelasan PT Bintang Delapan Wahana yang ditujukan kepada Bupati Morowali; 20. Pertimbangan Hukum untuk Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Penjelasan IUP PT Sultra Jembatan Mas dalam Pailit. 	
4	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah pelaksanaan penyampaian keterangan ahli/saksi ahli dan/atau beracara”</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018, permintaan keterangan ahli sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saksi ahli di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2018. 2. Keterangan ahli untuk menjelaskan dugaan tindak pidana yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi 	

No.	Keterangan	Paraf
	<p>Produksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Keterangan ahli untuk menjelaskan perkara dugaan tindak pidana yaitu menampung dan memanfaatkan pasir timah dari penambang yang tidak berijin. 4. Keterangan ahli dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan cadangan oleh PLN Batubara yang bekerjasama dengan PT Tansri Madjid Energy. <p>b) Pada triwulan II tahun 2018, permintaan keterangan ahli sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan ahli untuk menjelaskan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen proses penerbitan izin usaha perkebunan dan sertifikat guna usaha kelapa sawit. 2. Keterangan ahli untuk menjelaskan perkara dugaan tindak pidana yaitu menampung dan memanfaatkan pasir timah dari penambang yang tidak berijin. 3. Keterangan ahli untuk menjelaskan dugaan tindak pidana kegiatan penambangan tanpa memiliki IUP. 	
5	<p>Realisasi indikator kinerja “Pelayanan humas”</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018, telah terealisasi sebanyak 1 dokumen (Pelaksanaan Humas 25%), dengan progres sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 9 Januari 2018 rapat persiapan penandatanganan amandemen 1 KK dan 15 PKP2B, di ruang rapat lantai 4 gedung B Ditjen Minerba. 2. 17 Januari 2018 penandatanganan 1 KK dan 15 PKP2B, di ruang rapat sarulla KESDM. 3. 13 maret 2018 coffee morning sosialisasi perubahan peraturan perundang-undangan pertambangan minerba (di aula gedung C lantai 1 Ditjen Minerba). <p>b) Pada triwulan II tahun 2018, telah terealisasi sebanyak 2 dokumen, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum (Progress 25%). 2. Tanggal 25 April 2018 () Rapat Penyusunan draft Rubrikasi majalah energi dan Pengumpulan data dan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan di ruangan rapat lantai 4 gedung B ditjen minerba 3. Sosialisasi Hukum dan Kebijakan (Progress 25%) 6 juni 2018 konsultasi publik dan sosialisasi peraturan perundang undangan disektor pertambangan minerba bersama seluruh asosiasi pertambangan di indonesia, dia ruangan rapat lantai 5 gedung b ditjen minerba 4. Pelaksanaan humas Pada triwulan II, kegiatan pelaksanaan humas belum ada progress lanjutan, dikarenakan seluruh kegiatan humas harus berkoordinasi dengan Biro KLIK, dan pada TW 2 tidak ada pelaksanaan. 	Hg

No.	Keterangan	Paraf
6	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah dokumen perencanaan program dan penganggaran”</p> <p>Sampai dengan triwulan II TA 2018, dokumen perencanaan program dan penganggaran belum terealisasi dikarenakan dokumen baru akan selesai akhir tahun 2018.</p>	
7	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah dokumen evaluasi kinerja Ditjen Minerba”</p> <p>a) Pada triwulan I TA 2018, belum dilakukan rapat one on one meeting capaian kinerja triwulan I dikarenakan adanya pelaksanaan kegiatan reuiu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Surat Perintah Inspektorat Jenderal KESDM Nomor 353.Pr/07/IJN/2018 yang dimulai dari tanggal 9 s.d. 25 April 2018 oleh tim Inspektorat II KESDM.</p> <p>b) Pada triwulan II tahun 2018, telah terealisasi 2 dokumen evaluasi kinerja Ditjen Minerba yaitu dokumen evaluasi triwulan I & II TA 2018. Berdasarkan atas Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 557.Und/07/SDB/2018 tanggal 10 Agustus 2018 telah dilaksanakan kegiatan one on one meeting capaian kinerja triwulan I & II yang diadakan sekaligus pada tanggal 15 Agustus 2018.</p>	
8	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah informasi yang disampaikan ke masyarakat melalui website”</p> <p>a) Pada triwulan I TA 2018 telah terealisasi sebanyak 36 judul, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan Perjanjian Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, Dan PT Inalum Tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia 2. “ Melalui Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mendorong Terbentuknya Bangsa Yang Berkarakter” 3. Capaian Tahun 2017 dan Outlook 2018 Subsektor Mineral Dan Batubara 4. Rapat Koordinasi Awal Tahun 2018 Ditjen Minerba, KESDM 5. Penandatanganan Naskah Amandemen KK dan PKP2B 6. Rapat Manajemen Inspektur Tambang Dengan Koordinator Inspektur Tambang Seluruh Indonesia 7. Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Tertentu Dan Penyematan Satyalencana Karya Satya Untuk Masa Kerja 10, 20, dan 30 Tahun 8. Kunjungan Lapangan Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) 9. Pembahasan Progres Pelaksanaan Kegiatan Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) 10. Deregulasi Peraturan Sebagai Salah Satu Upaya Pemerintah Dalam Rangka Memberikan Kepastian dan Kemudahan Investasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan 11. Rapat Kerja Kementerian Esdm Bersama Komisi VII DPR RI 	

No.	Keterangan	Paraf
	12. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Subsektor Mineral Dan Batubara Tahun 2017 Melebihi Target	
	13. Rapat Persiapan Konsultasi Publik Terkait Rancangan Peraturan Menteri Terkait Penyederhanaan (deregulasi) Peraturan di Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	
	14. Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Esdm Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	
	15. Pelaksanaan Pelatihan Incident Investigation	
	16. Pertemuan Kepala Teknik Tambang (KTT)	
	17. Press Conference Kementerian ESDM Terkait Penataan Regulasi di Sektor ESDM	
	18. Acara Rembug CSR, Penandatanganan SK Blue Print PPM dan Pengukuhan Forum CSR Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur	
	19. Dirjen Minerba Hadiri Gala Dinner Acara Rembug CSR, Penandatanganan SK Blue Print PPM, dan Pengukuhan Pengurus Forum CSR Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur	
	20. Kepala Inspektur Tambang Upacara Penutupan Bulan K3 Nasional Pada Tahun 2018 Di PT. Kideco Jaya Agung	
	21. Pelantikan Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian ESDM	
	22. KAIT Membuka Pembukaan Kegiatan Adaro Fun Run 5k Bulan K3 Nasional 2018	
	23. Workshop Launching BLU PPSDM Geominerba	
	24. Rapat Pembahasan R-Permen Pengusahaan Dan Binwas	
	25. Rapat Pembahasan Kepmen Kewilyahan, Perizinan, dan RKAB	
	26. Harga Mineral Acuan Nikel Februari 2018 usd 12.425,75	
	27. Harga Mineral Logam Acuan (HMA) Dan Harga Batubara Acuan (HBA) Untuk Bulan Maret 2018	
	28. Pelatihan Bersama Penegak Hukum Tangani Perkara Korupsi di Kalimantan Barat, Sektor Tambang Jadi Sorotan	
	29. Peresmian PLTU Tanjung Bara Dan Pakan Ternak PT KPC	
	30. Sosialisasi Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Pertambangan Mineral dan Batubara	
	31. Maret 2018, HMA Aluminium usd 2.199,57 dan HBA usd 101,86	
	32. Penandatanganan Naskah Amandemen Kontrak Karya (KK)	
	33. Regulasi Perubahan Terkait Harga Batubara Untuk Pembangkit Dalam Listrik Dalam Negeri Atau Domestic Market Obligation (DMO)	
	34. Focus Group Discussion (FGD) Rantai Suplai Bijih Nikel Domestik Dan Harga Patokan Mineral	
	35. Binwas Ditjen Minerba Di Lubuk Linggau Sumatera Selatan	
	36. Sumpah PNS dan Pelantikan Pejabat Fungsional Ditjen Minerba	
	b) Pada triwulan II TA 2018 telah terealisasi sebanyak 20 judul, antara lain:	
	1. Diskusi Pengawasan Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah	
	2. Penyusunan Database Sistem Keamanan Objek Vital Sub Bidang Mineral dan Batubara Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme	

No.	Keterangan	Paraf
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Sektor ESDM Se-Provinsi Papua Barat 4. Dukungan Direktur Minerba Pada Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Tengah 5. April 2018, Harga Batubara Acuan usd 94,75/Ton dan Harga Mineral Logam Acuan Nikel usd 13.619,25/Dmt 6. Indonesia Miner 2018: Kebijakan Pemerintah Untuk Menarik Investor Di Bidang Pertambangan 7. Pembentukan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara 8. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Acara Promotion Day Gebyar Badan Layanan Umum (BLU) 9. HBA Mei 2018 Turun Menjadi usd 89,53/Ton 10. The 24th Annual Coaltrans Asia 11. Penghargaan Prestasi Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2018 12. Munggahan 2018 Ditjen Minerba 13. Penandatanganan Komitmen Pegawai Ditjen Minerba Mendukung WBK dan WBBM 14. Konsultasi Publik dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 15. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2018 16. Musyawarah Nasional IV Asosiasi Usaha Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) 17. Surat Edaran Pembayaran Iuran Tetap, Royalti dan Penjualan Hasil Tambang Melalui E-PNBP Minerba 18. Pengumuman Registrasi Sistem Elektronik PNPB Mineral dan Batubara (EPNPB Minerba) 19. HBA Juni 2018 Naik Menjadi usd 96,61/Ton 20. Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 	
9	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah publik yang mengunjungi website Ditjen Minerba”</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pada triwulan I TA 2018 telah terealisasi sebanyak 25.527 orang/pengunjung b) Pada triwulan II TA 2018 telah terealisasi sebanyak 19.885 orang/pengunjung 	
10	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah aplikasi yang dikembangkan”</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pada triwulan I TA 2018 belum ada aplikasi yang dikembangkan. Namun b) Pada triwulan II TA 2018, terdapat 2 aplikasi yang dikembangkan yaitu <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi LHV 2. Aplikasi TNDE 	

No.	Keterangan	Paraf
11	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah buku data dan informasi Minerba” Sampai dengan triwulan II TA 2018, belum ada buku data dan informasi minerba yang terealisasi karena masih dalam proses penyusunan.</p>	
12	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah penyebarluasan informasi melalui media pameran”</p> <p>a) Pada triwulan I TA 2018 belum dilaksanakan penyebarluasan informasi melalui media pameran.</p> <p>b) Pada triwulan II TA 2018, telah dilaksanakan 2 kegiatan penyebarluasan informasi melalui media pameran, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pameran Promotion Day Gebyar Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara (PPSDM Geominerba) yang berlangsung pada tanggal 3 – 5 Mei 2018 PPSDM Bandung. 2. Pameran Coaltrans Asia ke-24 yang berlangsung pada tanggal 6 – 8 Mei 2018 bertempat di Bali International Convention Center, The Westin Resort Denpasar, Bali. 	
13	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah laporan keuangan”</p> <p>a) Pada triwulan I TA 2018 sebanyak 1 Laporan yaitu, Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2017. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Realisasi kinerja pada triwulan I TA 2018 baru mencapai 33% dari target kinerja TA 2018.</p> <p>Data pada Laporan Keuangan merupakan data hasil proses rekonsiliasi pagu belanja, belanja, pengembalian belanja, estimasi PNBPNBP, dan mutasi UP, serta rekonsiliasi piutang PNBPNBP dengan Direktorat Penerimaan Minerba, Biro Keuangan, dan KPPN. Serta, telah direviu oleh Tim Inspektorat Jenderal. Periode rekonsiliasi dari bulan Januari sampai dengan Desember TA 2017.</p> <p>b) Pada triwulan II TA 2018 sebanyak 1 Laporan, yaitu Laporan Keuangan Audited TA 2017, dengan realisasi kinerja sebesar 50%. Atas kinerja Laporan Keuangan Audited TA 2017 Kementerian ESDM mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian.</p>	
14	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah dokumen perbendaharaan”</p> <p>a) Pada triwulan I TA 2018 telah terealisasi sebanyak 0 laporan, dikarenakan laporan diselesaikan di akhir tahun. Namun, persentase realisasi kinerja adalah $\pm 25\%$.</p> <p>b) Pada triwulan II TA 2018 telah terealisasi sebanyak 0 laporan, dikarenakan laporan diselesaikan di akhir tahun. Namun, persentase realisasi kinerja adalah $\pm 50\%$.</p>	

No.	Keterangan	Paraf
15	<p>Realisasi indikator kinerja “Persentase Penyelesaian LHP Itjen”</p> <p>a) Pada triwulan I TA 2018 telah tercapai realisasi penyelesaian LHP Itjen sebesar 60%. Dari 20 temuan administrasi dengan pengembalian senilai Rp37.898.000 telah ditindaklanjuti dan selesai sebanyak 8 temuan administrasi dengan pengembalian senilai Rp16.786.000. Sehingga, sisa saldo temuan adalah 12 temuan administrasi dengan pengembalian senilai Rp21.112.000.</p> <p>b) Pada triwulan II TA 2018 telah tercapai realisasi penyelesaian LHP Itjen sebesar 70%. Dari 12 temuan administrasi dengan pengembalian senilai Rp21.112.000, ditambah dengan hasil pemeriksaan baru sebanyak 12 temuan administrasi, sehingga total temuan 24 temuan. Telah ditindaklanjuti dan selesai sebanyak 2 temuan administrasi. Sisa saldo temuan adalah 22 temuan administrasi dengan pengembalian senilai Rp21.112.000.</p>	
16	<p>Realisasi indikator kinerja “Persentase Penyelesaian LHP BPK”</p> <p>a) Pada triwulan I TA 2018 telah tercapai realisasi penyelesaian LHP BPK sebesar 0%. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dilakukan per Semester. Sehingga, pada triwulan I TA 2018 masih dalam tahap koordinasi ke seluruh eselon II dan pengumpulan dokumen dalam rangka persiapan tindak lanjut Semester I.</p> <p>b) Pada triwulan II TA 2018 telah tercapai realisasi penyelesaian LHP BPK 38%. Dari 95 temuan administrasi dengan kerugian Negara senilai Rp673.065.447.485 dan USD149,843,526, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai rekomendasi sebanyak 34 temuan administrasi dengan setoran ke kas Negara Rp2.822.287.930 dan USD382,196. Sehingga, sisa saldo temuan adalah 61 temuan administrasi dengan kerugian Negara senilai Rp670.243.159.555 dan USD149,460,330.</p>	
17	<p>Realisasi indikator kinerja “Persentase SPM ditolak”</p> <p>a) Pada triwulan I TA 2018 telah terealisasi sebanyak 0%. Tidak ada SPM yang ditolak oleh KPPN Jakarta II.</p> <p>b) Pada triwulan II TA 2018 telah terealisasi sebanyak 0%. Tidak ada SPM yang ditolak oleh KPPN Jakarta II.</p>	
18	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah laporan pengelolaan BMN”</p> <p>a) Pada triwulan I TA 2018 sebanyak 1 Laporan yaitu Laporan BMN Audited TA 2017 dapat diselesaikan, sehingga Persentase penyelesaian kinerja adalah ± 20%.</p> <p>b) Pada triwulan II TA 2018 sebanyak 1 laporan Laporan BMN Semester I TA 2018 dapat diselesaikan, sehingga persentase penyelesaian kinerja adalah ± 50 %.</p>	
19	<p>Realisasi indikator kinerja “Persentase Penghapusan BMN Satker dan PKP2B”</p> <p>a) Pada triwulan I TA 2018, persentase penghapusan BMN satker dan PKP2B mencapai realisasi sebanyak 5 % dari target triwulan I</p>	

No.	Keterangan	Paraf
	<p>sebanyak 25 %. Hal ini dikarenakan banyak proses yang masih terhambat di PPBMN KESDM, Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan maupun di pihak KPKNL setempat.</p> <p>b) Pada triwulan II TA 2018, persentase penghapusan BMN satker dan PKP2B mencapai realisasi sebanyak 20 %. Hal ini dibantu dengan banyaknya proses penghapusan BMN PKP2B yang telah memasuki tahap penilaian. Sedangkan penghapusan BMN satker berupa kendaraan operasional masih terhambat karena belum adanya penilaian oleh Kemenkeu;</p>	
20	<p>Realisasi indikator kinerja “Persentase Penyelesaian KMK 376”</p> <p>a) Pada triwulan I TA 2018, persentase penyelesaian KMK mencapai realisasi sebanyak 2 % dari target triwulan I sebanyak 25 %. Hal ini dikarenakan anggaran kegiatan dimaksud belum disetujui dan permohonan dari perusahaan belum banyak yang diterima oleh Ditjen Minerba. Disamping itu, perusahaan juga belum memperoleh kejelasan substansi KMK 376/2017, sehingga masih terdapat multi tafsir.</p> <p>b) Pada triwulan II TA 2018, persentase penyelesaian KMK mencapai realisasi sebanyak 5 % dari target triwulan II sebanyak 50 %. Setditjen Minerba mengajukan anggaran tambahan yang diperoleh dari kelebihan target dan realisasi PNBPN 2018 sebanyak Rp. 1,4 M untuk kegiatan penyelesaian KMK, tetapi belum memperoleh persetujuan dari Kemenkeu c.q DJA.</p>	
21	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah laporan kerumahtanggaan dan ketatausahaan”</p> <p>1. Pada triwulan I TA 2018 telah terealisasi sebanyak 1 laporan dari target 7 laporan yaitu laporan Penghematan Energi dan Air Ditjen Minerba dengan persentase sebesar 14%.</p> <p>2. Pada triwulan II TA 2018 telah terealisasi sebanyak 2 laporan dengan total 3 laporan dari target 7 laporan kerumahtanggaan yaitu laporan Peningkatan Pelayanan Umum dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dengan persentase sebesar 43%.</p>	
22	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah arsip inaktif yang dikelola”</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018, jumlah arsip inaktif yang dikelola sebanyak 736 berkas dari target 2000 berkas arsip dengan persentase sebesar 37%.</p> <p>b) Pada triwulan II tahun 2018 jumlah arsip inaktif yang dikelola sebanyak 1275 berkas dari target 2000 berkas arsip dengan persentase sebesar 64%.</p>	
23	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan jabatan fungsional Inspektur Tambang”</p> <p>a) Pada triwulan I TA 2018, kegiatan pembinaan jabatan untuk fungsional Inspektur Tambang (IT) tidak ditargetkan untuk melaksanakan penilaian DUPAK IT karena penilaian dilaksanakan per</p>	

No.	Keterangan	Paraf																																																
	<p>semester. Namun demikian kegiatan pembinaan IT telah dilaksanakan berupa rapat manajemen Inspektur Tambang penempatan daerah dengan melibatkan seluruh Koordinator IT 34 Provinsi, Kepala Biro SDM serta Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Serta pemasangan finger print untuk 13 Provinsi, dikarenakan pemasangan finger print untuk 21 Provinsi lainnya telah dipasang pada tahun 2017.</p> <p>b) Pada triwulan II TA 2018, kegiatan pembinaan jabatan fungsional terhadap Inspektur Tambang Semester I belum dapat terealisasi dikarenakan bertepatan dengan bulan puasa dan libur hari raya dan kendala teknis lainnya.</p>																																																	
24	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi”</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018, jumlah pegawai yang mendapatkan peningkatan kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 262 pegawai yang terdiri dari 31 jenis pendidikan dan pelatihan.</p> <table border="1" data-bbox="295 875 1259 1886"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Diklat</th> <th>Jumlah Peserta</th> <th>No</th> <th>Jenis Diklat</th> <th>Jumlah Peserta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan Prima</td> <td>15</td> <td>17</td> <td>Pengelola Keuangan</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kepemimpinan Efektif</td> <td>1</td> <td>18</td> <td>Pendidikan Khusus Profesi Advokasi</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Training of Trainer (TOT)</td> <td>3</td> <td>19</td> <td>Evaluasi Laporan Eksplorasi Mineral</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Surveyor Tambang Bawah Tanah di Sawahlunto</td> <td>6</td> <td>20</td> <td>Pengawasan Bahan Peledak dan Peledakan Angkatan I dan II</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>English for Negotiator</td> <td>2</td> <td>21</td> <td>TP I Angkatan 5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Teknisi Pemboran dan Peledakan Tambang Bawah Tanah di Sawahlunto</td> <td>7</td> <td>22</td> <td>Fungsional Inspektur Tambang Pertama Angkatan III dan IV</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Teknis Pelaksana (TP) I Angkatan I</td> <td>2</td> <td>23</td> <td>Kepemimpinan Tingkat III</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Diklat	Jumlah Peserta	No	Jenis Diklat	Jumlah Peserta	1	Pelayanan Prima	15	17	Pengelola Keuangan	6	2	Kepemimpinan Efektif	1	18	Pendidikan Khusus Profesi Advokasi	5	3	Training of Trainer (TOT)	3	19	Evaluasi Laporan Eksplorasi Mineral	13	4	Surveyor Tambang Bawah Tanah di Sawahlunto	6	20	Pengawasan Bahan Peledak dan Peledakan Angkatan I dan II	24	5	English for Negotiator	2	21	TP I Angkatan 5	5	6	Teknisi Pemboran dan Peledakan Tambang Bawah Tanah di Sawahlunto	7	22	Fungsional Inspektur Tambang Pertama Angkatan III dan IV	40	7	Teknis Pelaksana (TP) I Angkatan I	2	23	Kepemimpinan Tingkat III	3	
No	Jenis Diklat	Jumlah Peserta	No	Jenis Diklat	Jumlah Peserta																																													
1	Pelayanan Prima	15	17	Pengelola Keuangan	6																																													
2	Kepemimpinan Efektif	1	18	Pendidikan Khusus Profesi Advokasi	5																																													
3	Training of Trainer (TOT)	3	19	Evaluasi Laporan Eksplorasi Mineral	13																																													
4	Surveyor Tambang Bawah Tanah di Sawahlunto	6	20	Pengawasan Bahan Peledak dan Peledakan Angkatan I dan II	24																																													
5	English for Negotiator	2	21	TP I Angkatan 5	5																																													
6	Teknisi Pemboran dan Peledakan Tambang Bawah Tanah di Sawahlunto	7	22	Fungsional Inspektur Tambang Pertama Angkatan III dan IV	40																																													
7	Teknis Pelaksana (TP) I Angkatan I	2	23	Kepemimpinan Tingkat III	3																																													

No.	Keterangan				Paraf
8	English for Presentation Skill	3	24	Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk pemetaan wilayah pertambangan	9
9	Pengusahaan Batu Mulia dan Batu Hias	7	25	Pengenalan geologi untuk penataan ruang	2
10	Pengawasan Eksplorasi Batubara	14	26	Pengolahan Data Geolistrik	4
11	Fungsional Inspektur Tambang Pertama Angkatan I dan II	40	27	Perencanaan Pasca Tambang Bawah Tanah di Bogor	5
12	TP I Angkatan 2	3	28	Perencanaan Tambang Bawah Tanah di Bogor	5
13	TP I Angkatan 3	4	29	Web Application Penetration Testing	1
14	Evaluasi Studi Kelayakan Usaha Pertambangan	13	30	Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan I	2
15	Geowisata	5	31	TP I Angkatan 6	6
16	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan II	7			

b) Pada triwulan II tahun 2018, , jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi yaitu sebanyak 64 pegawai. Pada triwulan 2, pelaksanaan diklat tertepatan dengan adanya puasa dan libur hari raya, sehingga jumlah pelaksanaan Diklat terbatas.

No	Jenis Diklat	Jumlah Peserta	No	Jenis Diklat	Jumlah Peserta
1	Leader as Coach Angkatan 1	2	7	Revolusi Mental Pelayanan Publik	1
2	Leader as Coach Angkatan 2	1	8	Jurnalistik	7

No.	Keterangan						Paraf																											
3		Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah Berbasis Geologi	3	9	Penyusunan Rencana Strategis	2																												
4		Purnabakti Angkatan 1 & 2	12	10	Pengenalan Legislative Drafting untuk Non Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan	2																												
5		TP I Angkatan 7	7	11	Persiapan Purnabakti Angkatan 3 & 4	4																												
6		Habbit of Excellence	23																															
25	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah laporan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan”</p> <p>Pada triwulan I TA 2018 telah terealisasi kegiatan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> kegiatan sumpah PNS yang telah dilaksanakan pada bulan Januari 2018 dengan jumlah peserta 13 orang Kegiatan pembinaan disiplin Kegiatan penyusunan Standar Pelayanan Publik, meliputi <p>Terkait Kenaikan Pangkat pegawai di lingkungan Ditjen Minerba, telah dilakukan rekapitulasi kenaikan pangkat terhadap pegawai Ditjen Minerba per 1 April 2018-dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="279 1568 1252 1960"> <thead> <tr> <th data-bbox="279 1568 359 1635">No</th> <th data-bbox="359 1568 973 1635">Unit Eselon II</th> <th data-bbox="973 1568 1252 1635">Jumlah Pegawai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="279 1635 359 1668">1</td> <td data-bbox="359 1635 973 1668">Sekretariat Ditjen Minerba</td> <td data-bbox="973 1635 1252 1668">14 Orang</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1668 359 1702">2</td> <td data-bbox="359 1668 973 1702">Direktorat Pembinaan Program Minerba</td> <td data-bbox="973 1668 1252 1702">8 Orang</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1702 359 1736">3</td> <td data-bbox="359 1702 973 1736">Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral</td> <td data-bbox="973 1702 1252 1736">12 Orang</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1736 359 1769">4</td> <td data-bbox="359 1736 973 1769">Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara</td> <td data-bbox="973 1736 1252 1769">16 Orang</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1769 359 1803">5</td> <td data-bbox="359 1769 973 1803">Direktorat Penerimaan Minerba</td> <td data-bbox="973 1769 1252 1803">7 Orang</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1803 359 1836">6</td> <td data-bbox="359 1803 973 1836">Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba</td> <td data-bbox="973 1803 1252 1836">20 Orang</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1836 359 1870">7</td> <td data-bbox="359 1836 973 1870">Penempatan Provinsi Aceh</td> <td data-bbox="973 1836 1252 1870">11 Orang</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1870 359 1904">8</td> <td data-bbox="359 1870 973 1904">Penempatan Provinsi Banten</td> <td data-bbox="973 1870 1252 1904">1 Orang</td> </tr> </tbody> </table>						No	Unit Eselon II	Jumlah Pegawai	1	Sekretariat Ditjen Minerba	14 Orang	2	Direktorat Pembinaan Program Minerba	8 Orang	3	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral	12 Orang	4	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara	16 Orang	5	Direktorat Penerimaan Minerba	7 Orang	6	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba	20 Orang	7	Penempatan Provinsi Aceh	11 Orang	8	Penempatan Provinsi Banten	1 Orang	
No	Unit Eselon II	Jumlah Pegawai																																
1	Sekretariat Ditjen Minerba	14 Orang																																
2	Direktorat Pembinaan Program Minerba	8 Orang																																
3	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral	12 Orang																																
4	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara	16 Orang																																
5	Direktorat Penerimaan Minerba	7 Orang																																
6	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba	20 Orang																																
7	Penempatan Provinsi Aceh	11 Orang																																
8	Penempatan Provinsi Banten	1 Orang																																

No.	Keterangan	Paraf
9	Penempatan Provinsi Bengkulu	4 Orang
10	Penempatan Provinsi D.I. Yogyakarta	3 Orang
11	Penempatan Provinsi Gorontalo	1 Orang
12	Penempatan Provinsi Jambi	8 Orang
13	Penempatan Provinsi Jawa Barat	4 Orang
14	Penempatan Provinsi Jawa Tengah	6 Orang
15	Penempatan Provinsi Jawa Timur	5 Orang
16	Penempatan Provinsi Kalimantan Barat	3 Orang
17	Penempatan Provinsi Kalimantan Selatan	7 Orang
18	Penempatan Provinsi Kalimantan Tengah	5 Orang
19	Penempatan Provinsi Kalimantan Timur	13 Orang
20	Penempatan Provinsi Kalimantan Utara	1 Orang
21	Penempatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6 Orang
22	Penempatan Provinsi Kepulauan Riau	3 Orang
23	Penempatan Provinsi Lampung	7 Orang
24	Penempatan Provinsi Maluku	-
25	Penempatan Provinsi Maluku Utara	26 Orang
26	Penempatan Provinsi NTB	6 Orang
27	Penempatan Provinsi NTT	7 Orang
28	Penempatan Provinsi Papua Barat	3 Orang
29	Penempatan Provinsi Riau	3 Orang
30	Penempatan Provinsi Sulawesi Barat	11 Orang
31	Penempatan Provinsi Sulawesi Selatan	15 Orang
32	Penempatan Provinsi Sulawesi Tengah	4 Orang
33	Penempatan Provinsi Sulawesi Tenggara	20 Orang
34	Penempatan Provinsi Sulawesi Utara	1 Orang
35	Penempatan Provinsi Sumatera Barat	9 Orang
36	Penempatan Provinsi Sumatera Selatan	6 Orang
37	Penempatan Provinsi Sumatera Utara	10 Orang
TOTAL		286 Orang

Sedangkan pada triwulan II TA 2018 telah terealisasi 2 laporan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan antara lain:

- Laporan Pengembangan Kompetensi PNS Ditjen Minerba; dan Pengembangan SDM dilakukan agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi, dengan standar kinerja yang telah ditetapkan (Kompetensi). Kompetensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan perannya dalam organisasi yang relevan dengan keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Kompetensi yang dimiliki pegawai secara

h

No.	Keterangan	Paraf
	<p>individual harus mampu mendukung pelaksanaan strategi organisasi dan mampu mendukung setiap dinamika dan perubahan yang terjadi.</p> <p>Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang demikian itu, perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM secara bertahap melalui program pendidikan dan pelatihan guna mendukung kinerja sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.</p> <p>Secara garis besar, ada tiga kegiatan yang dilaksanakan dalam Pengembangan Kompetensi Pegawai, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan Diklat - Koordinasi Diklat - Penyertaan Diklat <p>Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan pegawai yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat panggilan diklat kepada pegawai terkadang datanngnya mendadak. - Alokasi anggaran diklat Ditjen Minerba TA 2018 cukup kecil. <p>Upaya perbaikan kedepan yang dapat dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Diklat agar surat panggilan diklat sebaiknya dilakukan dua minggu sebelum tanggal pelaksanaan, sehingga peserta bisa mempersiapkan diri terkait izin pimpinan, penyesuaian dengan jadwal tugas di unitnya masing-masing dan kelengkapan persyaratan diklat. - Permohonan peningkatan alokasi anggaran diklat untuk tahun 2018 karena anggaran tidak mencukupi untuk penyertaan diklat seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Minerba khususnya pegawai penempatan provinsi. <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pembinaan Disiplin PNS <p>Pembinaan Disiplin PNS dilakukan dengan berpedoman pada UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP No 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Kepala BKN No 21/2010 tentang pelaksanaan disiplin PNS.</p> <p>Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan Peraturan Perundangan dan/atau peraturan kedinasan. Apabila melanggar, akan dijatuhi hukuman disiplin. Adapun jenis hukuman disiplin antara lain:</p>	

No.	Keterangan	Paraf
	<ul style="list-style-type: none"> - Ringan berupa teguran lisan / teguran tertulis / pernyataan tidak puas secara tertulis. - Sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun / penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun / penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. - Berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (satu) tahun / pemindahan dalam penurunan jabatan setingkat lebih rendah / pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu / pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. <p>Beberapa permasalahan yang terjadi terkait disiplin pegawai antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih terjadi pembiaran dari atasan langsung atas pelanggaran disiplin. - Terdapat modus penyalahgunaan fitur “Lupa Absen” di SIPEG. - Masih terdapat unit yang baru memproses pelanggaran disiplin setelah terjadi selama bertahun-tahun. - Penjatuhan jenis hukuman disiplin belum sesuai dengan UU No 5/2014 dan PP No 53/2010. <p>Adapun upaya perbaikan kedepan terhadap beberapa permasalahan yang telah dikemukakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fitur “Lupa Absen Datang dan Pulang” pada aplikasi SIPEG akan dihilangkan. - Diberlakukan pembatasan maksimal untuk “Lupa Absen Datang” dan “Lupa Absen Pulang” dalam 1 bulan sebanyak 3 (tiga) kali. 	

Jakarta, Agustus 2018

Setditjen Mineral dan Batubara	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
<p style="text-align: center;">Sekretaris Ditjen Minerba</p>  <p style="text-align: center;">Heri Nurzaman</p>	<p style="text-align: center;">Direktur Jenderal Mineral dan Batubara</p>  <p style="text-align: center;">Bambang Gatot Ariyono</p>

**BERITA ACARA HASIL *ONE ON ONE MEETING*
MONEV CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I & TRIWULAN II TAHUN 2018
UNIT ESELON II LINGKUP DITJEN MINERBA**

Hari/Tanggal : Senin, 20 Agustus 2018
Unit : Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara

Telah dilaksanakan *one-on-one meeting* tentang Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2018 Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara berdasarkan atas Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 566.Und/04/SDB/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal undangan.

Dengan catatan hasil pembahasan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Paraf
1	<p>Realisasi indikator kinerja "Jumlah Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara"</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018 sebesar 571 Juta USD dari target tahun 2018 sebesar 7.313 Juta USD (7,8%)</p> <p>b) Pada triwulan II tahun 2018 capaian investasi minerba tumbuh sebesar 221 Juta USD), sehingga total hingga triwulan II 2018 adalah sebesar 791,76 Juta USD dari target sebesar 7.313 Juta USD.</p> <p>Capaian Realisasi investasi belum tercapai sesuai dengan rencana, dikarenakan masih banyak perusahaan yang belum melaporkan realisasi investasinya baik secara manual maupun melalui sistem aplikasi data investasi minerba.</p> <p>Tindak Lanjut yang dilakukan Direktorat Pembinaan Program Minerba (DBP) adalah telah menyampaikan surat kepada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara (DBB dan DBM) untuk mendorong perusahaan untuk melaporkan realisasi investasinya. Selanjutnya, DBP akan mengundang para pemegang izin pertambangan baik IUP, KK, dan PKP2B sesuai kewenangan pusat dalam rapat pelaporan data investasi minerba tanggal 21 Agustus 2018.</p> <p>Total capaian target IKU "Jumlah Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara" hingga triwulan II 2018 adalah 10,8%</p>	<p>Subdit PIKS ✍</p>

2	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah Dokumen Rencana Produksi Minerba Nasional Tahun 2019”</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018, Persiapan Mekanisme Perencanaan Produksi Minerba dan Inventarisasi Rencana Produksi Minerba (40%), telah dilaksanakan pembahasan awal mekanisme penyusunan rencana produksi minerba tahun 2019 di P3GL, Cirebon tanggal 1 Februari 2018. Telah dilakukan rapat lanjutan penyusunan produksi minerba tahun 2019 pada hari jumat tanggal 23 Februari 2018 di Bandung. Telah dilaksanakan rekonsiliasi Data Rencana dan Kapasitas produksi Batubara per perusahaan per provinsi Tahun 2018-2024 sesuai Studi Kelayakan tanggal 16 Maret 2018. Telah dilaksanakan Rapat Peninjauan kembali Tingkat Produksi Mineral dan Batubara terhadap RUEN bersama DEN, Badan Geologi, Pusdatin, beserta K/L terkait tanggal 22 Maret 2018.</p> <p>b) Pada triwulan II tahun 2018, progres kegiatan bertambah sebesar 35% yang terdiri dari: Pra Finalisasi Perhitungan Rencana Produksi Mineral dan Batubara. Telah dilaksanakan rekonsiliasi Data Rencana dan Kapasitas produksi Batubara per perusahaan per provinsi Tahun 2018-2024 sesuai Studi Kelayakan lanjutan pada minggu ke 2 bulan April 2018. Dan telah mengirimkan nota dinas telaahan perhitungan kapasitas produksi batubara tahun 2019 ke Dirjen Minerba pada tanggal 25 Juni 2018.</p> <p>Total capaian target kinerja Jumlah Dokumen Rencana Produksi Minerba Nasional Tahun 2019 adalah 75%</p>	<p>Subdit PPP</p> <p></p>
3	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah Draft Keputusan Penetapan dan Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan/atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus”</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018, telah tersusun Draft Kepmen WIUP dan/atau WIUP telah diselesaikan termasuk lampirannya, selanjutnya menunggu penetapan dari Menteri ESDM (100%).</p> <p>b) Pada triwulan II tahun 2018, Telah menjadi Kepmen WIUP dan/atau WIUPK Mineral Logam dan Batubara termasuk lampirannya, dan telah dilakukan penetapan oleh MESDM. Dengan rincian WIUP (9 Blok) dan WIUPK (6 Blok) (100%).</p> <p>Total capaian target kinerja Jumlah Draft Keputusan</p>	<p>Subdit PW</p> <p></p>

<p>Penetapan dan Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan/atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah 100%</p>	
<p>4 Realisasi indikator kinerja “Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Mineral dan Batubara Dalam Negeri Tahun 2019”</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018, Pesiapan dan Inventarisasi Rencana Kebutuhan Minerba Dalam Negeri 2019 (40%). Telah dilaksanakan rapat inventarisasi rencana kebutuhan batubara dalam negeri tahun 2019 d I Ruang Rapat kantor P3GL, Cirebon pada 28 Maret 2018. Telah dilakukan Inventarisasi data rencana kebutuhan batubara dalam negeri dari sektor PLTU (PLN,IPP), Metalurgi, Pupuk, Semen, Tekstil, Kertas, dan Briket.</p> <p>b) Pada triwulan II tahun 2018 progres kegiatan bertambah sebesar 35% yang terdiri dari: Pra Finalisasi Rencana Kebutuhan Minerba Dalam Negeri 2019 (35%). Dan telah dilaksanakan rapat rencana kebutuhan batubara dalam negeri untuk industri pulp dan kertas serta tekstil tahun 2019 di Bandung, 9 Mei 2018. Total capaian target kinerja Jumlah dokumen rencana kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri tahun 2019 adalah 75%.</p>	<p>Subdit PPP</p> 
<p>5 Realisasi indikator kinerja “Jumlah Perusahaan Yang Merealisasikan Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara”</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018, sebanyak 48 Perusahaan (47%) Angka realisasi Triwulan I 2018 baru terhimpun 14 KK, 20 PKP2B, 2 IUPK dan 12 IUP PMA/Pusat (Batubara). Proses penyampaian laporan dari perusahaan dijadwalkan selama 30 (tiga puluh) hari setelah triwulan masa berakhir. Pemberitahuan terkait data realisasi investasi per bulan telah disampaikan ke pihak perusahaan.</p> <p>a) Pada triwulan II tahun 2018, sebanyak 64 perusahaan (63%) yang terdiri atas 18 KK dan 46 PKP2B yang telah merealisasikan investasi sub sektor minerba. Adanya peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan investasi sebesar 16% dari triwulan 1 tahun 2018.</p>	<p>Subdit PIKS</p> 

	<p>Total capaian target kinerja “Jumlah perusahaan yang merealisasikan investasi sub sektor mineral dan batubara” hingga triwulan II 2018 adalah 63%.</p>	
6	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah Pengelolaan Kerjasama Sub Sektor Mineral dan Batubara”</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018 telah dilakukan 2 kegiatan pengelolaan kerjasama subsektor mineral dan batubara (16,7%), Kegiatan ASOMM <i>Working Group</i> dilaksanakan bulan Mei 2018 di Filipina dan Kegiatan Indonesia-Japan <i>Energy Forum</i> yang dilaksanakan di Tokyo, Jepang pada tanggal 8-9 Mei 2018.</p> <p>b) Pada triwulan II tahun 2018 progres kegiatan bertambah 2 kegiatan sebesar 16,6 % yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The 36th ASEAN Senior Official Meeting on Energy (SOME) and its Associated Meeting</i> 22 s.d. 28 Juli 2018 di Singapura. 2. Kegiatan <i>Invitation to Intersessional Meeting of the ASEAN-China Joint Committee - Working Group on Rules of Origin</i> tanggal 2- 6 Agustus 2018 di Hanoi, Vietnam. <p>Dari target kinerja “Jumlah pengelolaan kerjasama sub sektor mineral dan batubara” sebanyak 12 target kegiatan kerjasama, hingga triwulan II telah terealisasi sebanyak 4 kegiatan (33%).</p>	Subdit PIKS ✍
7	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah Rekapitulasi Hasil Evaluasi WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan”</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018 dilakukannya 25 surat (50%) rekapitulasi hasil evaluasi WIUP mineral bukan logam dan batuan yang telah tersusun.</p> <p>b) Pada triwulan II tahun 2018, sebanyak 5 surat (10%) rekapitulasi hasil evaluasi WIUP mineral bukan logam dan batuan yang telah tersusun.</p> <p>Total capaian hingga triwulan II dari target kinerja “Jumlah rekapitulasi hasil evaluasi WIUP mineral bukan logam dan batuan” adalah sebesar 60%.</p>	Subdit PW ✍

8	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah Dokumen Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batubara”</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018, persiapan awal pembentukan tim kecil (20%), Melakukan Rapat Persiapan, Rapat Tim Perumus dan membentuk tim pembahasan kecil dengan tim perumus.</p> <p>b) Pada triwulan II tahun 2018, telah dilakukannya pembahasan Naskah kebijakan Minerba dan Road Map Minerba (30%). Dilakukan pembahasan Naskah dengan membagi tim menjadi 4 klaster sesuai dengan jumlah BAB yang terdapat dalam rumusan Kebijakan Minerba.</p> <p>Telah dilakukan rapat pembahasan Road Map Minerba dengan Kementerian PU PR, Kemenperin, BPPT, LIPI, Badan Geologi, Badan Litbang KESDM.</p> <p>Total capaian hingga triwulan II target kinerja “Jumlah dokumen kebijakan pertambangan mineral dan batubara dan dokumen Road Map Minerba” adalah sebesar 50%.</p>	<p>Subdit PP</p> 
9	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah Draft NSPK Pertambangan Mineral dan Batubara”</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018 telah disusun draft NSPK pertambangan Mineral dan Batubara (22%).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “Draft Perdirjen tentang Renstra DJMB 2020 – 2024” Inventarisasi data untuk penyusunan Perdirjen tentang Renstra DJMB 2020 – 2024 2. “Draft Perdirjen SOP Pelaporan Investasi Online” Draft Perdirjen SOP Pelaporan Investasi Online sedang disusun untuk kemudian diajukan ke Dirjen Minerba 3. “Draft RPJMN Produksi Mineral dan Batubara Tahun 2020 – 2024” <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Rapat Persiapan, Rapat Tim Perumus dan membentuk tim pembahasan kecil dengan tim perumus. Telah dilaksanakan melakukan kick off meeting dengan Bappenas terkait pembahasan RPJMN 2020-2024 pada Minggu ke-3 Februari • Telah dilaksanakan rekonsiliasi Data Rencana dan Kapasitas produksi Batubara per perusahaan per provinsi Tahun 2018-2024 sesuai Studi Kelayakan. 	<p>Subdit PP</p>  <p>Subdit PIKS</p>  <p>Subdit PPP</p> 

<p>4. “Draft Kepmen tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus” Draft pedoman Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan dan Pemberian WIUP dan/atau WIUP telah diselesaikan dan disampaikan ke Biro Hukum KESDM untuk di telaah.</p>	<p>Subdit PW P</p>
<p>b) Pada triwulan II tahun 2018 telah disusunnya draft NSPK pertambangan Mineral dan Batubara (28%).</p>	<p>Subdit PP</p>
<p>1. “Draft Perdirjen tentang Renstra DJMB 2020 – 2024” Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Sasaran Strategis untuk penyusunan Renstra DJMB 2020 – 2024.</p>	<p>Subdit PIKS</p>
<p>2. “Draft Perdirjen SOP Pelaporan Investasi Online” Rencana penyusunan draf Perdirjen SOP Pelaporan Investasi Online telah diubah menjadi draf Surat Edaran Dirjen tentang Pelaporan Berkala Atas Rencana dan Realisasi Investasi Pertambangan Mineral dan Batubara. Draf sudah diselesaikan dan diajukan ke Dirjen namun belum tidak disetujui oleh Dirjen dan diminta untuk diubah dalam bentuk Surat Direktur tentang Pelaporan Berkala Atas Rencana dan Realisasi Investasi Pertambangan Mineral dan Batubara.</p>	<p>Subdit PIKS A</p>
<p>3. “Draft RPJMN Produksi Mineral dan Batubara Tahun 2020 – 2024” Telah dilaksanakan rekonsiliasi Data Rencana dan Kapasitas produksi Batubara per perusahaan per provinsi Tahun 2018-2024 sesuai Studi Kelayakan lanjutan pada minggu ke 2 bulan April 2018 dan telah melakukan perhitungan <i>forecasting</i> data untuk rencana produksi batubara 2020-2024.</p>	<p>Subdit PPP P</p>
<p>4. “Draft Kepmen tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus” Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan dan Pemberian WIUP dan/atau WIUP telah ditetapkan Kepmen ESDM No 1798.k/30/MEM/2018 pada tanggal 20 April 2018.</p>	<p>Subdit PW P</p>
<p>Total capaian hingga triwulan II dari target kinerja “Jumlah draft NSPK pertambangan mineral dan batubara” adalah sebesar 50%.</p>	



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@minerba.esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Jakarta, Agustus 2018

Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
<p data-bbox="140 600 740 674">Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara</p>  <p data-bbox="268 853 608 887">Muhammad Wafid A. N</p>	<p data-bbox="879 600 1449 633">Direktur Jenderal Mineral dan Batubara</p>  <p data-bbox="991 853 1337 887">Bambang Gatot Ariyono</p>



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@minerba.esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 1776/04/DBM.PU/2018

Yang terhormat : Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Dari : Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
Tanggal : 13 September 2018
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Capaian Kinerja Triwulan I & Triwulan II Tahun 2018
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

Sehubungan dengan telah dilaksanakan rapat *one-on-one meeting* tentang Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2018 Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 566.Und/04/SDB/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Undangan, bersama ini kami sampaikan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I & Triwulan II Tahun 2018 Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral yang telah ditandatangani untuk dapat Saudara tindaklanjuti sesuai tugas dan fungsi Saudara.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur
Pembinaan Pengusahaan Mineral,

Bambang Susigit
NIP. 195811161991031001

Tembusan:
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@minerba.esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

BERITA ACARA HASIL ONE ON ONE MEETING
MONEV CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I & TRIWULAN II TAHUN 2018
UNIT ESELON II LINGKUP DITJEN MINERBA

Hari/Tanggal : Senin, 20 Agustus 2018
Unit : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

Telah dilaksanakan *one-on-one meeting* tentang Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2018 Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral berdasarkan atas Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 566.Und/04/SDB/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal undangan.

Dengan catatan hasil pembahasan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Paraf
1.	<p>Realisasi indikator kinerja "jumlah produksi mineral"</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tembaga, sebesar 66,179 Ton (21,35%), produksi tembaga pada triwulan I tercapai sesuai target;2) Emas, sebesar 35 Ton (47.16%), produksi emas pada triwulan I tercapai sesuai target;3) Perak, sebesar 87 Ton (37,78%), produksi perak pada triwulan I tercapai sesuai target;4) Timah, sebesar 18.294 Ton (36,59%), produksi timah pada triwulan I tercapai sesuai target;5) Produk Olahan Nikel, sebesar 57.103 Ton (6,64%), produksi NPI dan FeNi (Produk Olahan Nikel) pada triwulan I tidak sesuai target karena kendala biaya bahan baku pengolahan yang lebih tinggi dari rencana perusahaan;6) Nikel Matte, sebesar 17.368 Ton (21,71%), produksi nikel matte pada triwulan I tercapai sesuai target. <p>b) Hingga triwulan II tahun 2018</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tembaga, sebesar 95.116 Ton (30.68%), PT Smelting yang mengolah konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga melakukan maintenance pada triwulan II, sehingga produksi tembaga pada triwulan II tidak tercapai sesuai target;2) Emas, sebesar 49 Ton (64.92%), produksi emas pada triwulan II tercapai sesuai target;3) Perak, sebesar 144 Ton (62.49%), produksi perak pada triwulan II tercapai sesuai target;4) Timah, sebesar 38.891 Ton (77.78%), produksi timah pada triwulan II tercapai sesuai target;	<p style="text-align: center;"><i>At</i></p>

- 5) Produk Olahan Nikel, sebesar 216.167 Ton (25.14%), produksi NPI dan FeNi (Produk Olahan Nikel) pada triwulan II belum mencapai target karena realisasi biaya yang lebih tinggi dari rencana perusahaan, sehingga untuk menstabilkan keekonomian perusahaan mengurangi produksi NPI.
- 6) Nikel Matte, sebesar 36.003 Ton (45.00%), produksi nikel matte pada triwulan II tercapai sesuai target.

2. Realisasi indikator kinerja **“Jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri”**

Target untuk Tahun 2018 ialah Terbangunnya 2 (dua) Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian.

- a) Pada triwulan I tahun 2018, berdasarkan hasil evaluasi dari rencana yang telah disusun oleh perusahaan yang melakukan kegiatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian, diketahui bahwa pembangunan akan selesai pada triwulan 2 tahun 2018.
- b) Pada triwulan II tahun 2018, target 2 (dua) pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian untuk PT Virtue Dragon Nickel Industri dan PT Bintang Smelter Indonesia telah sesuai dengan target 2018 yaitu selesai pada April 2018.

AK

3. Realisasi indikator kinerja **“Jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan mineral dan batubara”**

- a) Pada triwulan I tahun 2018, sebesar Rp.372.275.235.320 (24,77%). Data realisasi PPM diperoleh dari laporan triwulan perusahaan. Realisasi PPM telah dilaksanakan untuk 8 program utama. Telah dilakukan koordinasi dan rapat dengan perusahaan untuk membahas tentang penyusunan rencana induk PPM dan realisasi dana PPM. Berdasarkan rencana strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 2015 – 2019 maka Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral pada tahun 2018 memiliki target kinerja terkait dengan dana PPM sebesar Rp. 1.503.000.000.000. Dengan target tersebut maka sampai dengan triwulan 1 maka realisasi dana PPM telah mencapai 24,77% dari target tahunan.
- b) Pada triwulan II tahun 2018, sebesar Rp.365.887.439.220 (24,34%). Berdasarkan rencana strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 2015 – 2019 maka Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral pada tahun 2018 memiliki target kinerja terkait dengan dana PPM sebesar Rp. 1.503.000.000.000. Dengan target tersebut maka pada triwulan 2 realisasi dana PPM telah mencapai 24,77% dari target tahunan. Sedangkan secara kumulatif sampai dengan triwulan 2 maka telah

AK

mencapai 49,11%. Pada triwulan 2 ini juga dilakukan koordinasi dan rapat dengan perusahaan untuk membahas tentang penyusunan rencana induk PPM dan realisasi PPM. Untuk mempercepat realisasi PPM di triwulan berikutnya perlu dilakukan koordinasi secara rutin dan meningkatkan kegiatan pengawasan

4. Realisasi indikator kinerja **“Jumlah lokasi pelaksanaan pembinaan pertambangan mineral kepada pemerintah daerah dan pemegang IUP”**

a) Pada triwulan I tahun 2018, telah dilakukan sebanyak 2 kegiatan pembinaan mineral kepada pemerintah daerah dan pemegang IUP, yaitu di daerah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah. Adapun nama-nama anggota Komisi DPR di daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. NTT : Ferry Kase, SH
2. Sulteng : H. Ahmad H.M. Ali, SH

b) Pada triwulan II tahun 2018, telah dilakukan sebanyak 3 kegiatan pembinaan mineral kepada pemerintah daerah dan pemegang IUP, yaitu di daerah Jogjakarta, Surabaya dan Gresik. Adapun nama-nama anggota Komisi DPR di daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jogjakarta : H Agus Sulistyono
2. Surabaya dan Gresik (Jatim) : Eni Maulana Saragih; Syaikhul Zislam Ali, Lc, M.Sos; H.N Fallah Amru; Ir. H.M Ridwan Hisyam; Bambang Haryadi, SE; H. Rofi Munawar; H. Totok Daryanto, SE

5. Realisasi indikator kinerja **“Jumlah pengawasan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral”**

Target pengawasan fasilitas pengolahan dan pemurnian untuk tahun 2018 ialah sebanyak 13 perusahaan:

a) Pada triwulan I tahun 2018, pengawasan ke lapangan dilakukan kepada 3 (tiga) perusahaan yang berencana ataupun sedang melakukan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian, yakni PT Ceria Nugraha Indotama, PT Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Bintang Smelter Indonesia;

b) Pada triwulan II tahun 2018, pengawasan ke lapangan dilakukan kepada 5 (lima) perusahaan yang berencana ataupun sedang melakukan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian, yakni PT Virtue Dragon Nickel Indonesia, PT Kinlin Nikel Industri, PT Freeport Indonesia, PT Kobar Lamandau Mineral, PT Sebuku Iron Lateritic Ores.

6.

Realisasi indikator kinerja "**Jumlah lokasi pelaksanaan inventarisasi data sumberdaya dan cadangan mineral**"

- a) Pada triwulan I tahun 2018, telah dilakukan koordinasi dengan PSDMBP dan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara sebagai stakeholder terkait dalam penyusunan Neraca Sumber Daya Mineral. Rapat koordinasi telah dilaksanakan pertama kali di Pos Pengamatan Gunungapi Gede, Jawa Barat tanggal 1 Februari 2018, pertemuan kedua diadakan di Ditjen Minerba pada tanggal 8 Februari 2018 dan pertemuan ketiga diadakan di Pos Gunung Guntur, Jawa Barat, 28 Februari – 2 Maret 2018. Pembahasan terfokus kepada mekanisme pemutakhiran neraca sumberdaya dan cadangan mineral, penyusunan SOP dan rencana pelaksanaan Inventarisasi Data Sumberdaya dan Cadangan Mineral. Disepakati bahwa pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Data Sumberdaya dan Cadangan Mineral akan dilaksanakan mulai dari triwulan II tahun 2018.
- b) Pada triwulan II tahun 2018, kegiatan Inventarisasi Data Sumberdaya dan Cadangan Mineral dilaksanakan bekerja sama dengan PSDMBP di Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta pada tanggal 9-11 April 2018 yang dihadiri oleh Dinas ESDM dari Provinsi Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah dan D.I. Jogjakarta. Data sumberdaya dan cadangan mineral yang didapatkan berasal dari sebagian Regional Sumatera dan sebagian Regional Jawa.

4

7.

Realisasi indikator kinerja "**Jumlah perusahaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pencapaian kinerja kegiatan pertambangan mineral**"

- a) Pada triwulan I tahun 2018, difokuskan pada penyelesaian persetujuan RKAB untuk perusahaan KK dan IUP PMA. Total RKAB yang disetujui sebanyak 59 persetujuan RKAB untuk KK dan IUP PMA tahap operasi produksi dan 32 persetujuan RKAB untuk KK dan IUP PMA tahap eksplorasi. Untuk pengawasan langsung ke lapangan telah dilaksanakan sebanyak 1 kali ke PT Pacific Granitama.
- b) Pada triwulan II tahun 2018, penyelesaian persetujuan RKAB berlanjut dengan total sebanyak 22 persetujuan RKAB untuk KK dan IUP PMA tahap operasi produksi dan 10 persetujuan RKAB untuk KK dan IUP PMA tahap eksplorasi. Pengawasan langsung ke lapangan dilaksanakan sebanyak 15 kali ke PT Sulawesi Cahaya Mineral, PT ANTAM Kalbar, PT Citra Harapan Abadi, PT Purnama Gemilang, PT Freeport Indonesia, PT Mineral Industri Sukabumi, PT ANTAM Malut, PT Mitra Usaha Riau, PT Multi Citra Global, PT Panca Resources Indonesia, PT Aswindo Pratama, PT Puri Sakti, PT Dicepco

4

Indonesia, PT Nusa Halmahera Mineral, PT Pelsart Tambang Kencana. Untuk rencana di triwulan berikutnya, pengawasan lapangan

8. Realisasi indikator kinerja **“Jumlah sistem monitoring produksi dan penjualan mineral”**

- a) Pada triwulan I tahun 2018, telah dilakukan proses pelelangan untuk mendapatkan tim konsultan yang akan mengerjakan sistem monitoring produksi dan penjualan komoditas mineral dan batubara.
- b) Pada triwulan II tahun 2018, setelah melakukan koordinasi dengan Pusdatin KESDM, Ditjen Minerba sepakat untuk menggabungkan aplikasi monitoring mineral dengan aplikasi monitoring batubara. Hingga saat ini aplikasi Minerba Online Monitoring System (MOMS) masih dalam tahap pengerjaan, dan ditargetkan selesai pada Desember 2018,

Be

9. Realisasi indikator kinerja **“Jumlah lokasi inventarisasi dan analisis potensi kerugian negara akibat pertambangan tanpa izin pada WIUP Mineral”**

- a) Pada triwulan I tahun 2018, dilakukan tahap persiapan pelaksanaan inventarisasi dan analisis potensi kerugian negara akibat pertambangan tanpa izin. Tahap persiapan dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh dari pemegang IUP dan IUPK. Selain itu juga dilakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait lainnya.
- b) Pada triwulan II tahun 2018, dilakukan pelaksanaan inventarisasi dan analisis potensi kerugian negara akibat pertambangan tanpa izin. Pada triwulan II ini dilakukan kunjungan lapangan ke PT Indomuro Kencana, untuk menginventarisasi kegiatan PETI dalam wilayah kontrak karya PT Indomuro Kencana. Setelah dilakukan kunjungan lapangan maka dilakukan pengolahan data untuk menganalisis potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh kegiatan PETI didalam wilayah PT Indomuro Kencana. Hasil kunjungan lapangan adalah sebagai berikut :
 - Blok Tasat yang berada di bagian barat wilayah kontrak karya PT IMK. Jumlah PETI diperkirakan sekitar 1000 orang. Kegiatan penambangan telah memakai excavator dan menggali lubang vertikal dan horizontal. Pengolahan menggunakan gelondong dan tong siram untuk proses recovery. Pengolahan bijih oleh PETI menggunakan Merkuri dan Sianida tanpa ada pengelolaan limbah.
 - Blok PBH terdiri dari Tambang Permata, Tambang Bantian dan Tambang Hulubai. Pada Tambang Bantian kegiatan penambangan oleh PETI didominasi sistem KATO. Pada Tambang Permata dan Tambang Hulubai penambangan

WV

dilakukan dengan cara penggalian. Sebagian besar bijih dari Blok PBT diangkat keluar untuk dilakukan pengolahan dengan metode gelondong dan tong siram.

- Blok Serujan telah berhasil dikosongkan dari kegiatan PETI dengan dibantu aparat keamanan setempat. Saat ini pada Blok Serujan sedang dilakukan kegiatan eksplorasi seperti pemetaan geologi dan pemboran inti.
- Potensi pencemaran lingkungan pada wilayah yang terdapat PETI terutama diakibatkan oleh penggunaan merkuri dan sianida dalam proses pengolahan emas.
- Potensi pelanggaran K3 dalam hal penanganan bahan-bahan berbahaya (merkuri, sianida), masalah erosi tanah yang menyebabkan longsor akibat penambangan yang tidak mengikuti aturan.
- Kegiatan PETI yang dilakukan pada area bekas tambang mengganggu kegiatan pengelolaan lingkungan seperti penataan air tambang, pembukaan lahan dan area reklamasi.
- Potensi kehilangan emas akibat PETI adalah sebesar 189 gr/hari atau 63,504 kg/tahun.
- Nilai potensi kerugian negara setara dengan (@ Rp. 500.000/gr emas) = Rp. 31.752.000.000.

10. Realisasi indikator kinerja **“Persentase penggunaan produk dalam negeri yang digunakan oleh perusahaan mineral”**

a) Pada triwulan I tahun 2018, dilakukan evaluasi terhadap 12 perusahaan dengan total persentasi ketercapaian sebesar 78%. Adapun perusahaan yang sudah dievaluasi adalah sebagai berikut :

1. PT Freeport Indonesia;
2. PT Amman Mineral Nusa Tenggara;
3. PT Vale Indonesia;
4. PT Nusa Halmahera Minerals;
5. PT J Resources Bolaang Mongondow;
6. PT Meares Sopotan Mining;
7. PT Tambang Tondano Nusajaya;
8. PT Agincourt Resources;
9. PT Kasongan Bumi Kencana;
10. PT Indo Muro Kencana;
11. PT Natarang Mining;
12. PT Woyla Aceh Minerals.

b) Pada triwulan II tahun 2018, persentasi ketercapaian sebesar 70% yang dilakukan evaluasi terhadap 6 perusahaan. Adapun perusahaan yang sudah dievaluasi adalah sebagai berikut :

1. PT Amman Mineral Nusa Tenggara;
2. PT Vale Indonesia;
3. PT Nusa Halmahera Minerals;

f

11.	<p>4. PT J Resources Bolaang Mongondow; 5. PT Agincourt Resources; 6. PT Kasongan Bumi Kencana;</p> <p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah bahan perumusan kebijakan terkait pengelolaan dan pemanfaatan data hasil kegiatan eksplorasi mineral”</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018, dilakukan inventarisasi data hasil kegiatan eksplorasi mineral dengan cara pengumpulan rekap hasil kegiatan eksplorasi dari masing-masing perusahaan KK. Untuk progress pelaksanaan kegiatan sekitar 10%.</p> <p>b) Pada triwulan II tahun 2018, sudah dilakukan rapat pertama dengan mengundang narasumber yakni praktisi eksplorasi dari PT Freeport Indonesia, Bapak Wahyu Sunyoto pada tanggal 3 Mei 2018 membahas tentang tahapan pelaksanaan eksplorasi dan pengelolaan datanya. Untuk progress pelaksanaan sekitar 30%.</p>	
-----	--	---

Jakarta, Agustus 2018

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
<p>Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral</p>  <p>Bambang Susigit</p>	<p>Direktur Jenderal Mineral dan Batubara</p>  <p>Bambang Gatot Ariyono</p>



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@minerba.esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

**BERITA ACARA HASIL ONE ON ONE MEETING
MONEV CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I & TRIWULAN II TAHUN 2018
UNIT ESELON II LINGKUP DITJEN MINERBA**

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018
Unit : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

Telah dilaksanakan *one-on-one meeting* tentang Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2018 Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara berdasarkan atas Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 557.Und/07/SDB/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal undangan.

Dengan catatan hasil pembahasan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Paraf
1.	Realisasi indikator kinerja " Jumlah Produksi Batubara " a) Pada triwulan I tahun 2018: sebanyak 114 Juta Ton dari target 485 Juta Ton data update per 30 April 2018 dengan persentase sebesar 23,7% b) Pada triwulan II tahun 2018: sebanyak 79 Juta Ton dari target 485 Juta Ton data update per 30 Juli 2018 dengan persentase sebesar 16%. Dikarenakan masih dalam tahap persiapan kegiatan Rekonsiliasi Data Produksi untuk Data Produksi IUP Daerah.	
2.	Realisasi indikator kinerja " Jumlah pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO) " a) Pada triwulan I tahun 2018: sebesar 5% (26 Juta Ton) dari target 32% jumlah pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri. Data update per 30 April 2018 b) Pada triwulan II tahun 2018: sebesar 5% (23 Juta Ton) dari target 32% jumlah pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri. Data update per 30 Juli 2018	
3.	Realisasi indikator kinerja " Jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan mineral dan batubara "	

a) Pada triwulan I tahun 2018, sebanyak 60 Miliar dari target 375 Miliar dengan persentase sebesar 16%, dengan rincian:

- 1) PKP2B = 44,927 Miliar Rupiah,
 - 2) IUP BUMN = 13,612 Miliar Rupiah,
 - 3) IUP PMA = 1,135 Miliar Rupiah
- update per 30 April 2018

b) Pada triwulan II tahun 2018, sebanyak 82 Miliar dari target 375 Miliar dengan persentase sebesar 21% dengan rincian:

- 1) PKP2B = 60,735 Miliar Rupiah,
 - 2) IUP BUMN = 21,145 Miliar Rupiah,
 - 3) IUP PMA = 70,2 Juta Rupiah
- update per 30 Juli 2018

4. Realisasi indikator kinerja **"Jumlah fasilitasi perselisihan, pendampingan PPM dan jumlah inventarisir potensi kerugian kegiatan penambangan tanpa izin PETI komoditas batubara di wilayah PKP2B dan IUP PMA"**

a) Pada triwulan I tahun 2018:

sebanyak 25 Laporan dari target 17 Laporan dengan persentase sebesar 141% update per 30 April 2018
adapun rincian laporan yang dimaksud sebagai berikut:

a. Jumlah fasilitasi perselisihan (13 laporan)

- Laporan rapat fasilitasi:
 1. Rapat dengan Kemitraan Persekutuan Dayak Kaltim (masalah MHU)
 2. Rapat SUTT PLN dan PT Tanito Harum.
 3. Rapat SUTT PT Minemex - PLN
 4. BAP Pasal Kasus 162 UU Minerba (Kasus Kel. Peternak Kerbau Rawa - PT KPC)
 5. Rapat masalah lahan hauling PT KJA dan Koperasi Gapura.
- Surat tanggapan, baik berupa hasil klarifikasi dari perusahaan sebagai terlapor dan/atau penjelasan dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara.
 1. Tanggapan PT Banjarsari Pribumi ke Dinas ESDM Kalsel
 2. Nota Dinas masalah Permohonan Pengalihan Jalan Nasional Sangatta- Simpang Perdau (PT KPC)
 3. Nota Dinas Rencana Kemitraan Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) dengan PT MHU
 4. Tanggapan Permintaan Penjelasan Klarifikasi PT MHU
 5. Tanggapan Obvitnas PT Adaro Indonesia kepada Kapolres Barito Selatan.

6. Tanggapan permintaan klarifikasi kepada PT Berau Coal mengenai lahan dengan PT Syahid Agro Nusantara.
7. Tanggapan atas keberatan Kuasa Hukum Kelompok Peternak Kerbau Rawa.
8. Tanggapan permasalahan lahan PT KJA dan Koperasi Gapura
9. Tanggapan Permohonan Pengelolaan Pertambangan dari Ahli waris AP Sosro Negoro (kepada Kemenkoplhukam)

b. Pendampingan PPM (8 laporan)

- Laporan hasil koordinasi terkait penyusunan dan penetapan *Blue Print* PPM pada triwulan I telah dilakukan di 5 (lima) Provinsi, yaitu: Sumsel, Jambi, Kaltim, Kalteng, dan Kaltara.
- Laporan hasil koordinasi penyusunan dan penetapan Rencana Induk PPM pada Triwulan I, telah dilakukan 3 (tiga) Perusahaan. Perusahaan yang dimaksud adalah: PT Singlurus Pratama, PT Indominco Mandiri, dan PT Indexim Coalindo.

c. Jumlah inventarisir potensi kerugian kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) komoditas batubara.

- Surat permintaan data kegiatan PETI kepada seluruh perusahaan PKP2B dan IUP PMA. Satu Surat permintaan kegiatan PETI Kepada seluruh Perusahaan PKP2B, IUP BUMN, dan IUP PMA. Terdapat 10 Perusahaan yang membalas dan melaporkan kegiatan PETI di wilayah Perusahaan
- Surat penindakan Penambangan Tanpa Izin (PETI) kepada Kepala PPNS. Satu Surat permintaan penindakan Penambangan Tanpa Izin (PETI) kepada Kepala PPNS.
- Surat Permintaan Penyelesaian PETI kepada Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi, Kemenkoplhukam.
- Laporan inventarisasi PETI dengan unit terkait dan perusahaan. Terdapat 2 laporan. Perusahaan langsung ber kirim surat pelaporan kepada Polisi.

b) Pada triwulan II tahun 2018:

sebanyak 19 dari target 17 Laporan dengan persentase sebesar 88% update per 30 Juli 2018

adapun rincian laporan yang dimaksud sebagai berikut:

a. Jumlah fasilitasi perselisihan (12 laporan)

- Laporan rapat fasilitasi:
 1. Rapat Pemanfaatan Indexim dan PT GAM
 2. Rapat Temuan Batubara hasil PETI PT Kendilo Coal Indonesia.
 3. Rapat Masalah Lahan PT Jorong Barutama greston dan PT Sarana Subur Agrindotama (Perkebunan)

- Surat tanggapan, baik berupa hasil klarifikasi dari perusahaan sebagai terlapor dan/atau penjelasan dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara.
 1. Nota Dinas LSM PAMPEL(masalah reklamasi)
 2. Nota Dinas Obvitnas PT BIB ke DTL
 3. Tanggapan mengenai Klarifikasi PT Berau Coal kepada PT Syahid Agro Nusantara.
 4. Tanggapan ke Kadis ESDM Bengkulu mengenai pemanfaatan Batubara Sungai.
 5. Tanggapan ke LSM PAMPEL sesuai Klarifikasi PT MHU
 6. Nota Dinas terkait Rencana Pemindahan stockpile batubara temuan PT KCI
 7. Nota Dinas Penyesuaian Obvitnas PT KJA.
 8. Tanggapan Permintaan klarifikasi PT Trubaindo (case Kepala Adat Besar Dayak Bentian)
 9. Tanggapan ke PT Dayak Karya Mandiri (masalah lahan PT MHU).

b. Pendampingan PPM (5 laporan)

- Laporan hasil koordinasi dengan 9 Dinas ESDM Provinsi terkait penyusunan dan penetapan *Blue Print*. Koordinasi terkait penyusunan dan penetapan Blue Print PPM pada triwulan II telah dilakukan di 4 (empat) Provinsi, yaitu: Bengkulu, Riau, Aceh dan Sumbar.

- Laporan rebug PPM (Pemerintah, Pemda, Perusahaan dan Stakeholder lainnya). Koordinasi terkait penyusunan dan penetapan Rencana Induk PPM pada triwulan II telah dilakukan 1 (satu) Perusahaan. Perusahaan yang dimaksud adalah: PT Kideco Jaya Agung.

c. Jumlah inventarisir potensi kerugian kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) komoditas batubara (2 laporan)

- Surat penindakan Penambangan Tanpa Izin (PETI) kepada Kepala PPNS. Terdapat satu Laporan yang diserahkan kepada Kepala PPNS. Dilakukan rapat yang dipimpin oleh Kepala PPNS dengan mengundang PPNS, PT Antang Gunung Meratus.
- Surat Permintaan Penyelesaian PETI kepada Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi, Kemenkopohukam. Telah dilakukan rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia melalui Asdep Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Selaku Ketua Sub Desk Konflik Berlatar Belakang Pertambangan terkait PT Antang Gunung Meratus.

5. Realisasi indikator kinerja **“Jumlah lokasi pembinaan kegiatan pertambangan batubara kepada pemerintah daerah dan izin usaha pertambangan”**

- a) Pada triwulan I tahun 2018:
 sebanyak 0 Lokasi dari target 8 Lokasi (Kaltim, Kalsel, Kalbar, Sumut, Riau (Kab Indragiri), Riau (Pekanbaru), Sumsel (Kab Muara Enim) dan Sumsel (Kab Lubuk Linggau)) dengan persentase sebesar 0% dikarenakan belum dilakukan pembinaan kegiatan pertambangan batubara kepada Pemerintah Daerah dan IUP
- b) Pada triwulan II tahun 2018:
 sebanyak 1 Lokasi dari target 8 Lokasi (Kaltim, Kalsel, Kalbar, Sumut, Riau (Kab Indragiri), Riau (Pekanbaru), Sumsel (Kab Muara Enim) dan Sumsel (Kab Lubuk Linggau)) dengan persentase sebesar 12,5% telah dilakukan pembinaan kegiatan pertambangan batubara kepada Pemerintah Daerah dan IUP di Kab. Lubuk Linggau (Provinsi Sumatera Selatan)

6. Realisasi indikator kinerja **“Jumlah daerah yang dilakukan inventarisir sumber daya dan cadangan”**

- a) Pada triwulan I tahun 2018:
 sebanyak 6 Daerah (Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan utara, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Jambi) dari target 14 Daerah (Prov. Aceh, Prov Sumut, Prov Sumbar, Prov Riau, Prov Jambi, Prov Sumsel, Prov Bengkulu, Prov Lampung, Prov Banten, Prov Kaltara, Prov Kalteng, Prov Kaltim, Prov Kalsel dan Prov Sulawesi Tenggara) dengan persentase sebesar 42,9% dikarenakan adanya kegiatan yang dilakukan segera (monitoring dan

evaluasi triwulan perusahaan yang sudah masuk dari Bulan Oktober 2017 – April 2018)

b) Pada triwulan II tahun 2018:

sebanyak 2 Daerah (Lampung dan Kalimantan Selatan) dari target 14 Daerah (Prov. Aceh, Prov Sumut, Prov Sumbar, Prov Riau, Prov Jambi, Prov Sumsel, Prov Bengkulu, Prov Lampung, Prov Banten, Prov Kaltara, Prov Kalteng, Prov Kaltim, Prov Kalsel dan Prov Sulawesi Tenggara) dengan persentase sebesar 14,2% dikarenakan adanya kegiatan yang dilakukan segera (monitoring dan evaluasi triwulan perusahaan yang sudah masuk dari Bulan Oktober 2017 – April 2018)

7. Realisasi indikator kinerja "**Persentase pembelian barang dalam negeri pada perusahaan pertambangan batubara**"

a) Pada triwulan I tahun 2018:

total belanja barang dan bahan dalam negeri adalah sebesar USD 407.366.236 atau sekitar 19% dari total rencana belanja barang dan bahan sebesar USD 2.143.253.247.

b) Pada triwulan II tahun 2018:

total belanja barang dan bahan dalam negeri adalah sebesar USD 496.820.381 atau sekitar 23% dari total rencana belanja barang dan bahan sebesar USD 2.143.253.247.

Secara kumulatif, sampai dengan triwulan II tahun 2018 total belanja barang dan bahan dalam negeri adalah sebesar USD 904.186.619 atau sekitar 42% dari total rencana belanja barang dan bahan sebesar USD 2.143.253.247.

Tahun 2018 Ditjen Minerba menargetkan realisasi belanja barang dan bahan dalam negeri sebesar 90%, lebih rendah dari realisasi 2017 yaitu 94%. Hal ini dikarenakan:

1. Adanya beberapa PKP2B dalam tahap konstruksi melakukan pembelian impor untuk *processing plant* dan infrastruktur lainnya. PKP2B yang masih memiliki fasilitas impor, akan menggunakan fasilitas tersebut sehingga biaya perusahaan efisien.
2. Sebagian kegiatan penambangan dialihkan kepada subkontraktor, sehingga meningkatkan porsi belanja jasa dan mengurangi porsi belanja barang PKP2B.

8. Realisasi indikator kinerja "**Jumlah aplikasi sistem pelaporan perusahaan pertambangan batubara berbasis online**"

a) Pada triwulan I tahun 2018:

sebanyak 0 Aplikasi. Aplikasi monitoring produksi dan

mg-

24/8

a

	<p>pemasaran batubara: <i>on progress</i> update per 30 April 2018</p> <p>b) Pada triwulan II tahun 2018: sebanyak 0 Aplikasi. Aplikasi monitoring produksi dan pemasaran batubara: <i>on progress</i> update per 30 Juli 2018</p>	
9.	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah penetapan harga batubara acuan”</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018: sebanyak 3 Penetapan dengan rincian Januari, Februari dan Maret dari target 12 Penetapan (HBA dari Januari - Desember 2018) data update per 30 April 2018</p> <p>b) Pada triwulan II tahun 2018: sebanyak 3 Penetapan dengan rincian April, Mei, dan Juni dari target 12 Penetapan (HBA dari Januari - Desember 2018) data update per 30 Juli 2018</p>	
10.	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) PKP2B Tahap Konstruksi dan Operasi Produksi dan / atau IUP PMA Operasi Produksi”</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018: sebanyak 73 Perusahaan dengan rincian 45 PKP2B, 1 IUP BUMN dan 27 IUP PMA dari target 105 Surat Persetujuan RKAB dengan persentase sebesar 70%. Data update per 30 April 2018</p> <p>b) Pada triwulan II tahun 2018: sebanyak 21 Perusahaan dengan rincian 16 PKP2B dan 5 IUP PMA dari target 105 Surat Persetujuan RKAB dengan persentase sebesar 20%. Sebanyak 11 perusahaan IUP PMA tidak disetujui. Data update per 30 Juli 2018.</p>	
11.	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah perusahaan batubara PKP2B dan IUP PMA yang diawasi”</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018: Sebanyak 37 Perusahaan, yaitu dari target 105 perusahaan, dengan persentase sebesar 35%. Data update per 30 April 2018</p> <p>b) Pada triwulan II tahun 2018: sebanyak 22 Perusahaan dari target 105 perusahaan, dengan persentase sebesar 21%. Data update per 30 Juli 2018</p> <p>Pengawasan terhadap PKP2B dan IUP PMA belum dilakukan kunjungan lokasi tambang, namun sudah dilakukan pengawasan administrasi terkait laporan bulanan dan triwulan.</p>	

12. Realisasi indikator kinerja **"Jumlah lokasi pembinaan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan batubara"**

- a) Pada triwulan I tahun 2018:
sebanyak 0 Lokasi, dengan persentase sebesar 0% dikarenakan sehubungan dengan belum diundangkannya Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang menjadi bahan materi pembinaan berupa bimbingan teknis terhadap pemerintah daerah. Data update per 30 April 2018
- b) Pada triwulan II tahun 2018:
sebanyak 3 Lokasi, dengan persentase sebesar 100%. Telah dilakukan kegiatan pembinaan kepada Pemerintah Daerah di 1 lokasi, yaitu di Kota Bogor (Jawa Barat), Kota Palembang dan Kota Balikpapan, dengan mengundang Kementerian dan Lembaga terkait seperti BKPM, Kementerian Hukum dan HAM dan unit terkait di Ditjen Minerba sehubungan dengan proses evaluasi penyesuaian IUP PMA. Data update per 1 Juli 2018.

[Handwritten signature]
24/8

13. Realisasi indikator kinerja **"Jumlah Pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri"**

- a) Pada triwulan I tahun 2018:
kebutuhan batubara dalam Negeri Triwulan I tahun 2018 adalah 26,46 Juta ton :
- PLTU : 20,44 Juta ton
 - Semen : 3,72 Juta ton
 - Pupuk : 0,36 Juta ton
 - Tekstil : 0,7 Juta ton
 - Kertas : 0,80 Juta ton
 - Metalurgi : 0,44 Juta ton
 - Briket : - Juta ton
- dari target 25% dari rencana produksi 2018. Data update per 30 April 2018
- b) kebutuhan batubara dalam Negeri Triwulan II tahun 2018 adalah 22,67 Juta ton :
- PLTU : 22,67 Juta ton
 - Semen : 3,72 Juta ton
 - Pupuk : 0,36 Juta ton
 - Tekstil : 0,7 Juta ton
 - Kertas : 0,80 Juta ton
 - Metalurgi : 0,44 Juta ton
 - Briket : - Juta ton
- dari target 25% dari rencana produksi 2018. Data update per 30 Juli 2018

[Handwritten signature]

14.	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah rekomendasi pemenuhan pemanfaatan batubara untuk kebutuhan domestik tahun 2018 sebesar 25% dari rencana produksi 2018”</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018: sebanyak 1 Rekomendasi, yaitu dari 1 Rekomendasi dengan persentase sebesar 100%. Sesuai dengan Kepmen ESDM No 23.K/30/MEM/2018 tanggal 5 Januari 2018. Data update per 30 April 2018</p> <p>b) Pada triwulan II tahun 2018: Capaian realisasi telah tercapai pada triwulan pertama, Sesuai dengan Kepmen ESDM No 23.K/30/MEM/2018 tanggal 5 Januari 2018. Data update per 30 Juli 2018</p>	
-----	---	--

Jakarta, Agustus 2018

<p>Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara</p>	<p>Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara</p>
<p>Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara</p>  <p>Sri Raharjo</p>	<p>Direktur Jenderal Mineral dan Batubara</p>  <p>Bambang Gatot Ariyono</p>

**BERITA ACARA HASIL ONE ON ONE MEETING
MONEV CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I & TRIWULAN II TAHUN 2018
UNIT ESELON II LINGKUP DITJEN MINERBA**

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018
Unit : Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara

Telah dilaksanakan *one-on-one meeting* tentang Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2018 Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara berdasarkan atas Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 557.Und/07/SDB/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal undangan.

Dengan catatan hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Realisasi indikator kinerja **"Jumlah usulan Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba"**

- a) Pada triwulan I tahun 2018, realisasi jumlah DBH sebesar Rp 2,84 Triliun.
b) Pada triwulan II tahun 2018, realisasi jumlah DBH sebesar Rp 2,84 Triliun.
Realisasi jumlah DBH mengacu kepada PMK Nomor 112/2017.

2. Realisasi indikator kinerja **"Jumlah Penerimaan Negara dari Sub Sektor Minerba"**

- a) Pada triwulan I tahun 2018, realisasi jumlah PNBPN sebesar Rp 11,91 Triliun.
b) Pada triwulan II tahun 2018, realisasi jumlah PNBPN sebesar Rp 11,09 Triliun.

Jenis Penerimaan	Triwulan I TA 2018		Triwulan II TA 2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Iuran Tetap	Rp 0,19 T	Rp 0,17 T	Rp 0,19 T	Rp 0,14 T
Royalti	Rp 4,27 T	Rp 6,89 T	Rp 4,27 T	Rp 6,79 T
Penjualan Hasil Tambang	Rp 3,56 T	Rp 4,85 T	Rp 3,56 T	Rp 4,15 T

Iuran tetap belum tercapai pada triwulan I dan II TA 2018 disebabkan oleh pemegang IUP yang masa berlaku IUP habis dan tidak diperpanjang, selain itu adanya pencutian wilayah IUP.

3. Realisasi indikator kinerja **"Persentase usulan penyaluran PNBPN Minerba berdasarkan realisasi penerimaan pada Dana Bagi Hasil Target 17,85 Triliun"**

- a) Usulan Penyaluran PNBPN SDA Minerba pada Triwulan I TA 2018 sebesar 20%.
b) Usulan Penyaluran PNBPN SDA Minerba pada Triwulan II TA 2018 sebesar 20%.
Persentase usulan penyaluran PNBPN SDA Minerba TA 2018 berdasarkan PMK Nomor 112/2017 Pasal 77 ayat (2) yang menyebutkan pembagian proporsi Dana Bagi Hasil untuk masing-masing triwulan sebagai berikut:
- Triwulan I : 20% dari pagu alokasi
 - Triwulan II : 20% dari pagu alokasi
 - Triwulan III : Maksimal 30% dari pagu alokasi dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara hingga semester I.

- Triwulan IV : Sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I sampai triwulan III.

4. Realisasi indikator kinerja **“Jumlah perusahaan pemegang IUP CnC yang diverifikasi kewajiban PNB Minerba”**

- Jumlah perusahaan pemegang IUP CnC yang kewajiban PNB Minerba-nya diverifikasi pada Triwulan I TA 2018 adalah sebanyak 793 perusahaan.
- Jumlah perusahaan pemegang IUP CnC yang kewajiban PNB Minerba-nya diverifikasi pada Triwulan II TA 2018 adalah sebanyak 413 perusahaan.

Sampai dengan triwulan II TA 2018, perusahaan pemegang IUP CnC yang diverifikasi kewajiban PNB nya telah melebihi target tahunan. Hal ini dikarenakan perusahaan pemegang IUP CnC pro aktif melaporkan kewajiban pembayaran PNB nya kepada Ditjen Minerba melalui aplikasi SIMPONI.

5. Realisasi indikator kinerja **“Jumlah piutang PNB Minerba yang terselesaikan”**

- Pada triwulan I TA 2018, jumlah piutang PNB Minerba yang telah terselesaikan sebanyak Rp 222,6 Miliar.
- Pada triwulan II TA 2018, jumlah piutang PNB Minerba yang telah terselesaikan sebanyak Rp 119,5 Miliar.

Jumlah piutang PNB Minerba yang terselesaikan sampai dengan triwulan II TA 2018 masih kecil dikarenakan perusahaan belum membayar piutang kepada Pemerintah Pusat. Namun, Ditjen Minerba sudah mengirimkan surat penagihan piutang kepada perusahaan.

6. Realisasi indikator kinerja **“Jumlah sistem informasi elektronik PNB Minerba yang dikembangkan”**

- Sistem informasi elektronik PNB Minerba yang dikembangkan adalah Aplikasi e-PNB Minerba. Adapun pada triwulan I TA 2018, baru terealisasi 10% (tahap persiapan).
- Pada triwulan II TA 2018, progres aplikasi e-PNB Minerba adalah sebesar 30% (tahap pengembangan sistem e-PNB Minerba).

Jakarta, 27 Agustus 2018

Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
<p>Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara</p>  <p>Jonson Pakpahan</p>	<p>Direktur Jenderal Mineral dan Batubara</p>  <p>Bambang Gatot Ariyono</p>

**BERITA ACARA HASIL ONE ON ONE MEETING
MONEV CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I & TRIWULAN II TAHUN 2018
UNIT ESELON II LINGKUP DITJEN MINERBA**

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018
Unit : Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

Telah dilaksanakan *one-on-one meeting* tentang Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2018 Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara berdasarkan atas Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 566.Und/04/SDB/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal undangan.

Dengan catatan hasil pembahasan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Paraf
1	<p>Realisasi indikator kinerja “Luas reklamasi lahan bekas pertambangan mineral dan batubara”</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018, capaian luas reklamasi lahan bekas tambang adalah seluas 904,23 ha.</p> <p>b) Pada triwulan II tahun 2018, capaian luas reklamasi lahan bekas tambang adalah seluas 982,71 ha.</p> <p>Capaian kumulatif luas lahan reklamasi lahan bekas tambang adalah seluas 1.886,94 ha atau 27,35% dari target tahun 2018. Hal ini dikarenakan karena kegiatan reklamasi lahan bekas tambang dikerjakan setelah lahan tambang dan timbunan selesai. Sesuai tren, hal tersebut terjadi pada triwulan III dan IV sekaligus menunggu musim hujan untuk kegiatan penanaman atau revegetasi. Pencapaian reklamasi lahan bekas tambang akan optimal dilaksanakan pada rentang waktu tersebut.</p>	KSDPL 
2	<p>Realisasi indikator kinerja “Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara”</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018, realisasi tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara adalah sebesar 0,17.</p> <p>b) Pada triwulan II tahun 2018, realisasi tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara adalah sebesar 0,1.</p> <p>Capaian tingkat kekerapan dapat lebih kecil dari target dikarenakan angka kekerapan kecelakaan atau FR didapatkan dari rekapitulasi data TW I dan TW II per bulan Juli 2018.</p>	KSDKP 

No.	Keterangan	Paraf
3	<p>Sesuai dengan rumus $FR = \frac{\text{jumlah korban kecelakaan} \times 1.000.000}{\text{jumlah jam kerja kumulatif}}$; maka nilai FR per triwulan tidak dapat memperlihatkan ketercapaian kinerja target per tahun. Nilai FR yang benar akan didapatkan pada akhir tahun 2018.</p> <p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah NSPK di bidang teknik dan lingkungan mineral dan Batubara”</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018, draf NSPK di bidang aspek teknik dan lingkungan mineral dan batubara yang telah selesai sebanyak 1 draf. Jumlah realisasi di triwulan I baru 1 draf dikarenakan perlu waktu dalam pembahasan NSPK tersebut</p> <p>b) Pada triwulan II tahun 2018, draf NSPK di bidang aspek teknik dan lingkungan mineral dan batubara yang telah selesai sebanyak 5 draf. Realisasi indikator kinerja sebanyak 50 %, dan telah sesuai dengan target.</p>	Korlak DBT 
4	<p>Realisasi indikator kinerja “Jumlah Perusahaan Pertambangan mineral dan Batubara yang diawasi aspek teknis dan lingkungan secara administrasi atau lapangan (perusahaan)”</p> <p>a) Pada triwulan I tahun 2018, jumlah perusahaan yang telah diawasi aspek teknik dan lingkungan adalah sebanyak 23 perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Realisasi jumlah perusahaan sebanyak 92 %, ketidaktercapaian target jumlah perusahaan dikarenakan dana perjalanan dinas yang bersumber dari PNP, sehingga belum dapat digunakan dari awal tahun.</p> <p>b) Pada triwulan II tahun 2018, jumlah perusahaan yang telah diawasi aspek teknik dan lingkungan adalah sebanyak 52 perusahaan pertambangan mineral dan batubara atau telah sesuai dengan target</p>	Korlak DBT 

Jakarta, Agustus 2018

<p>Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara</p>	<p>Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara</p>
<p>Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara</p>  <p>M. Hendrasto </p>	<p>Direktur Jenderal Mineral dan Batubara</p>  <p>Bambang Gatot Ariyono</p>